

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH****(STUDI PADA PEMERINTAH KOTA DI PROVINSI ACEH)****Oleh:****Shara Amelia Putri**

Akuntansi, STIE Bumi Persada Lhokseumawe

Email : [sharaameliaputri@bumipersada.ac.id](mailto:sharaameliaputri@bumipersada.ac.id)**Surya Darni**

Manajemen, STIE Bumi Persada Lhokseumawe

Email: [suryadarni@bumipersada.ac.id](mailto:suryadarni@bumipersada.ac.id)**Article Info***Article History :**Received 16 Agustus - 2022**Accepted 25 Agustus - 2022**Available Online**30 September - 2022***Abstract**

*The purpose of this study is to determine the impact of regional economic growth, revenue-sharing funds, general distribution funds, and local revenue growth on regional spending growth. The study analyzed data by multiple linear regression and was conducted in 23 district/municipal governments in Aceh. The results show that regional economic growth, revenue-sharing funds, general distribution funds, and regional revenue growth simultaneously and partially affect regional spending growth. These results suggest that increases in regional spending are likely to occur as a result of higher local income levels and economic growth.*

**Keyword :**

*Regional Economic Growth, Revenue Sharing Fund, The General Allocation Fund, local revenue growth, Regional and District / City Expenditure Growth*

**1. PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah dan DPRD mengatur dan menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bentuk peraturan daerah atau Qanun. Alokasi sumber daya dalam anggaran APBD harus didasarkan pada prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal daerah, kebijakan pemerintah pusat, dan rekomendasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Anggaran yang tertuang dalam peraturan daerah atau qanun tersebut kemudian menjadi validitas bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Dana penyelenggaraan pemerintahan menurut dasar desentralisasi ditanggung oleh APBD. Dalam rangka pengelolaan pemerintahan dan jasa layanan publik berdasarkan asas desentralisasi, memberdayakan daerah untuk memungut pajak (*tax*) dan mengatur sumber daya alam. Sumber pendanaan untuk kabupaten meliputi

pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan pinjaman daerah, desentralisasi, dan misi bantuan. Tiga sumber pertama dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan sumber lainnya dikelola oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah (Halim, 2012).

Salah satu pertimbangan penting dalam pengalokasian APBD adalah keterkaitannya dengan beberapa indikator ekonomi daerah, seperti kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan primer daerah (PAD). Selain itu, jumlah transfer fiskal pusat dan kebijakan lain yang diterima daerah juga harus diperhitungkan. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat bergantung pada dana atau dana yang dihimpun dari berbagai potensi sumber daya yang dimiliki daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana atau dana yang terkumpul diatur

melalui sistem pengelolaan keuangan daerah APBD.

Permasalahan setelah diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal adalah pertumbuhan pendapatan daerah lambat, sedangkan peningkatan permintaan biaya pelayanan publik semakin intens. Keadaan ini mengakibatkan terbatasnya penerimaan dan kesulitan dalam merencanakan distribusi belanja pelayanan publik.

Selain pertumbuhan ekonomi, kemandirian fiskal daerah yang diukur dengan PAD sebagai persentase dari total pendapatan daerah juga menjadi pertimbangan penting dalam alokasi belanja daerah. Hal ini karena PAD merupakan sumber daya dan penggunaannya atas kebijaksanaan pemerintah daerah dan kesepakatan dengan DPRD. Meskipun bagian PAD dari total pendapatan tidak besar, yaitu sekitar 4-10%, dampaknya terhadap belanja daerah cukup signifikan (Abdullah dan Rone, 2014).

Riset ini bertujuan untuk mengkaji dampak pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dana bagi hasil (*Revenue Sharing Fund*), dana alokasi umum (*The General Allocation Fund*), dan pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan belanja daerah di Aceh. *Economic Growth* adalah salah satu penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang tinggi tidak serta merta menggambarkan kemakmuran rakyat, karena pertumbuhan ekonomi hanya mencerminkan bagaimana pembangunan dilakukan, dan tidak dapat menggambarkan bagaimana pembangunan itu merata dalam rangka pencapaian kesejahteraan rakyat.

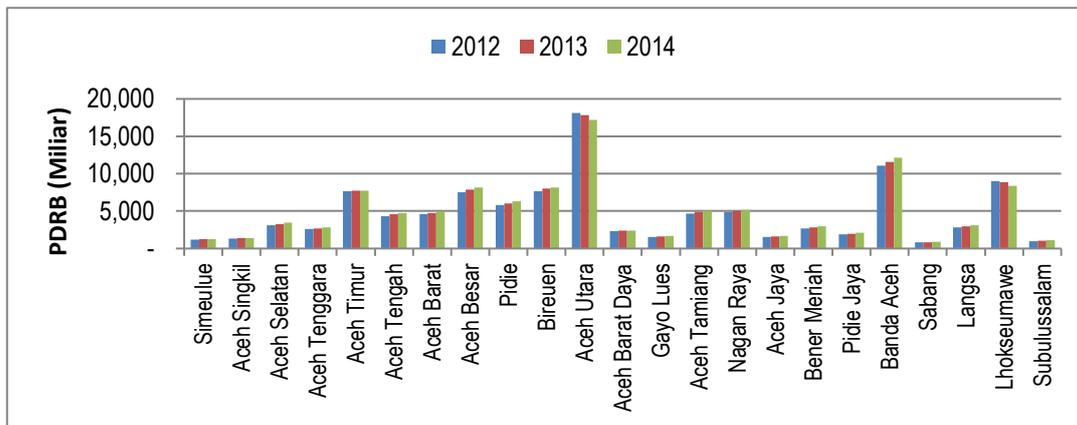
Pembiayaan pembangunan daerah berasal dari PAD (*Regional income*), Dana Perimbangan yang termasuk Dana Bagi Hasil (*Revenue Sharing Fund*), Dana Alokasi Umum (*The General Allocation Fund*), dan Dana Alokasi Khusus (*Special Allocation Fund*), dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Penurunan PAD bisa juga disebabkan oleh Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah, sehingga daerah tersebut akan mengandalkan dana perimbangan yang akan menimbulkan gejala fiskal stress.

Dana Bagi Hasil (*Revenue Sharing Fund*) merupakan pendanaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Provinsi Aceh, sebagai salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, menerima 70% dari penerimaan DBH, terutama sumber daya migas. Ketentuan ini melampaui aturan pemerintahan sendiri yang biasa dimana bagi hasil provinsi hanya berasal dari 15% minyak dan 35% gas alam. Akan tetapi, sumber lain harus digali untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti pajak.

Realisasi DAU semakin meningkat setiap tahunnya. Kenaikan/penurunan jumlah DAU yang diterima oleh setiap kabupaten/kota dapat disebabkan oleh formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menentukan DAU. Jumlah DAU yang diterima Kabupaten/Kota memperhitungkan faktor-faktor berikut: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, persentase kesenjangan kemiskinan, nilai PAD, dll. Oleh karena itu, sebagai salah satu kinerja dan konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kenaikan atau penurunan DAU tidak ditentukan oleh kinerja daerah. DAU dirancang untuk menggantikan transfer dalam bentuk subsidi kepada daerah otonom. Tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan pemerataan kapasitas fiskal sehingga masing-masing daerah tidak memiliki besaran DAU yang sama. Daerah dengan PAD rendah akan mendapatkan DAU tinggi, sebaliknya daerah dengan PAD tinggi akan mendapatkan DAU rendah.

Menurut Bappenas (2015), "pertumbuhan ekonomi Indonesia positif selama 2010-2014, namun melambat selama empat tahun terakhir hingga akhir 2014". Pertumbuhan ekonomi Aceh, dengan perkembangan migas, mencapai puncaknya pada 3,85% pada tahun 2012, sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2010 adalah 1,29%, menurut Situasi Perekonomian Provinsi Aceh oleh Badan Pusat Statistik (2015)." Dari tahun 2010 hingga 2012, pertumbuhannya cenderung meningkat, namun setelah tahun 2012, pertumbuhannya menurun dari tahun ke tahun." Pertumbuhan ekonomi melambat dan tetap stabil hingga tumbuh sebesar 4,13% pada tahun 2014. Data pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2012-2013 berdasarkan data PDRB ditunjukkan pada gambar berikut:



**Gambar 1.1 PDRB Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2012 s/d 2014**

**Sumber: BPS Provinsi Aceh, data diolah**

Berdasarkan penelitian Halim (2002), ”diketahui bahwa pemerintah daerah di Indonesia pada umumnya masih miskin, yang tercermin dari tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah.”

Menurut data BPS, terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah di Indonesia kurang dari 10% dari total pendapatan daerah. Kondisi yang sama berlaku untuk pemerintah kabupaten/kota Aceh. Menurut data penerimaan pemerintah kabupaten/kota provinsi Aceh dari tahun 2010 hingga 2014, kontribusi PAD terhadap penerimaan berkisar antara 1,20% hingga 15,15%. Realisasi PAD oleh pemerintah kabupaten/kota Aceh menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2012 hingga 2014.

Dari sisi belanja anggaran pemerintah daerah, realisasi belanja tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan kekuatan daerah dan kota untuk melakukan pembangunan daerah membutuhkan sumber pendanaan yang semakin besar. Di sisi lain, sumber keuangan kabupaten dan kota yang berasal dari PAD masih relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah, sehingga mengakibatkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah dan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi (Sriyana, 2011).

Kenaikan belanja daerah setiap tahunnya tidak sebanding dengan peningkatan PAD. Lambatnya pertumbuhan PAD dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan biaya untuk memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah menjadi permasalahan tersendiri dalam

pelaksanaan APBD. Keterbatasan PAD menyulitkan perencanaan alokasi belanja daerah. Kondisi tersebut berakibat pada pengalokasian belanja daerah untuk pelayanan publik menjadi kurang optimal terhadap pencapaian target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, ”belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.” Belanja daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa belanja daerah menurut kategori belanja meliputi: (a) Belanja tidak langsung adalah kelompok belanja anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan; (b) Belanja Langsung adalah kelompok anggaran belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. . berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja pemerintah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain/tak terduga

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah**

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah mengakibatkan pemerintah daerah memberikan kewenangan pengelolaan keuangan. Tujuan utama pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah mengefektifkan belanja pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat seperti pembangunan fasilitas pelayanan publik. Desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama kontribusi belanja pemerintah daerah [1].

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah perlu memprioritaskan kebijakan yang tepat sasaran untuk merangsang sektor riil, sehingga mendorong percepatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan alokasi belanja daerah berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks tidak langsung, alokasi belanja daerah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Teori belanja publik menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif, skala belanja pemerintah cenderung meningkat [2].

BPS Provinsi Aceh (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami puncaknya pada tahun 2012, dan setelah tahun 2012, pertumbuhannya terus menurun setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Aceh berada di bawah rata-rata nasional sebesar 5,3%. Ekonomi tumbuh hanya 3,3% pada tahun 2016, atau sedikit meningkat setelah negatif 0,7%. Tahun 2013 hanya 2,6% dan tahun 2014 hanya 1,5%.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah**

Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan salah satu modal dasar bagi pemerintah daerah untuk

memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah non-PAD selain DAU dan DAK. Model bagi hasil didasarkan pada persentase asal tertentu. Penerimaan pajak DBH dari: Bagian 21 Pajak Penghasilan (PPH 21), Bagian 25 Pajak Penghasilan (PPH 25), Bagian 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPND). Sedangkan penerimaan DBH SDA berasal dari: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak, pertambangan gas, pertambangan panas bumi [3]

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah**

Pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam [4]. Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah [5]. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

### **Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah**

Pendapatan daerah yang cukup krusial adalah PAD [6][7]. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu bagian dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan dalam periode tahun bersangkutan. Definisi PAD menurut ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, pengertian pendapatan asli daerah antara lain:

- a. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber wilayah sendiri;
- b. Dipungut berdasarkan peraturan daerah;
- c. Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Desentralisasi diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas pemerintah daerah, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Sumber pendapatan daerah diantaranya adalah PAD. Kecenderungan PAD yang selalu bertambah saat perubahan anggaran, membuka peluang bagi legislatif untuk merekomendasikan penambahan anggaran bagi program dan kegiatan yang menjadi preferensinya [8,Abdullah, 2015).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara populasi pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Pemerintah kabupaten/kota di Aceh berjumlah sebanyak 23 pemerintahan yang terdiri dari 18 pemerintah kabupaten dan lima pemerintah kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data diperoleh dari website Dirjen Perimbangan Keuangan Pemda. Adapun data yang dimaksud adalah: (1) Laporan Pertumbuhan Ekonomi PemProv Aceh, (2) Laporan Realisasi APBD PemProv Aceh yang terdiri dari: (a) Realisasi PAD, (b) Realisasi DAU, (c) Relisasi DBH, dan (d) Realisasi Belanja Modal.

Horizon waktu dalam penelitian ini menggunakan data *pooling* yaitu kombinasi antara data runtut waktu (*time-series*) dan data silang tempat (*cross-section*), dimana pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan alokasi belanja daerah periode tahun 2013–2015 sebagai *time series* dan 23 pemerintah kabupaten/kota di Aceh sebagai data *cross-section*.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari APBD dan PDRB Kabupaten dan Kota di Aceh. Dokumen APBD diperoleh dari Peraturan Daerah tentang APBD masing-masing kabupaten dan kota sedangkan data PDRB sebagai pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian berupa APBD yaitu sebanyak 69 APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Aceh Tahun Anggaran 2013 sampai 2015 dan data pertumbuhan ekonomi berupa PDRB dari BPS Provinsi Aceh. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk melihat secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan belanja daerah, baik secara simultan maupun secara parsial.

### 4. HASIL PENELITIAN

#### Hasil Deskriptif Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat distribusi data variabel yang diteliti. Kondisi ini memberikan gambaran umum mengenai nilai statistik data penelitian seperti rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Secara lengkap, analisis deskriptif pertumbuhan ekonomi daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif Data Penelitian (N = 69)**

No	Uraian	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maksimum
1	Pertumbuhan_Belanja_Daerah_(Y)	21,97	14,48	-31,18	57,90
2	Pertumbuhan_Ekonomi_Daerah_(X1)	2,91	3,87	-17,82	5,44
3	Pertumbuhan_PAD_(X2)	57,39	57,86	-4,42	309,26
4	Dana_Bagi_Hasil_(X3)	54,90	86,2	8,2	510,0
5	Dana_Alokasi_Umum_(X4)	496,5	140,8	252,0	780,0

Sumber: Data penelitian (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa antara tahun 2013-2015 rata-rata (mean) pertumbuhan belanja daerah yang terjadi pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh 5 sebesar 21,97%. Nilai minimum dan maksimum pertumbuhan belanja daerah masing-masing adalah -31,18% dan 57,90%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga 2015, pertumbuhan belanja daerah pemerintah provinsi/kota Aceh terendah sebesar -31,18%, menurun sebesar 31,18%, dan tertinggi sebesar 57,90%.

Dari tahun 2013 hingga 2015, nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah/kota Aceh sebesar 2,91%. Nilai maksimum dan minimum pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing adalah -17,82% dan 5,44%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun 2013 hingga 2015 terendah sebesar -17,82% (penurunan) dan tertinggi sebesar 5,44%.

Dari tahun 2013 hingga 2015, Nilai rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh sebesar 57,39%. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah pemerintah daerah/kota Aceh cukup tinggi atau cukup berhasil secara rata-rata tahunan. Nilai maksimum dan minimum pertumbuhan pendapatan mentah daerah masing-masing adalah -4,42% dan 309,26%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2013 hingga 2015 berkisar minimal -4,42% (penurunan) hingga maksimal 309,26%. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 20.

Jika dilihat dari tabel diatas, Nilai rata-rata (*mean*) untuk Dana Bagi Hasil (DBH) sepanjang 3 tahun sebesar 54,9 Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar 8,2 Milyar Rupiah untuk Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2013 sedangkan nilai maksimum untuk DBH sebesar 510 Milyar Rupiah untuk Kabupaten Aceh Utara pada 2014. Nilai standar deviasi sepanjang 3 tahun pengamatan sebesar 86,2.

Sedangkan untuk nilai rata-rata (*mean*) Dana Alokasi Umum (DAU) sepanjang 3 tahun sebesar 496,5 Milyar Rupiah, dengan nilai minimum sebesar 252 Milyar Rupiah untuk Kabupaten Subulussalam pada tahun 2013, sedangkan nilai maksimum sebesar 780 Milyar Rupiah diperoleh Kabupaten Aceh Bireuen pada tahun 2015. Nilai standar deviasi sepanjang 3 tahun pengamatan sebesar 140,8.

### **Hasil Pengujian Hipotesis**

Hasil analisis data penelitian secara statistik didapatkan model regresi sebagai berikut:  
$$Y = 19,061 + 0,465X_1 + 0,074X_2 + 0,904X_3 + 1,803X_4 + \epsilon$$

Dimana Y adalah pertumbuhan belanja daerah,  $X_1$  sebagai variabel pertumbuhan ekonomi daerah dan  $X_2$  adalah variabel pertumbuhan pendapatan asli daerah. Nilai  $\alpha$  sebesar 19,061 menunjukkan apabila semua variabel bebas (*independent variable*) memiliki nilai nol, maka nilai variabel terikat (*dependent variable*) yaitu pertumbuhan belanja daerah sebesar 19,061. Nilai *R Square* sebesar 0,099 menunjukkan bahwa variabel bebas (*independent variable*) pada penelitian ini, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap variabel dependen (*dependent variable*) yaitu pertumbuhan belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh sebesar 9,90%. Sisanya sebesar 90,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Dari persamaan diatas bisa kita ketahui bahwa nilai konstanta ( $a$ ) adalah sebesar -19,061, yang artinya apabila DBH/ *Revenue Sharing Fund* ( $X_1$ ), dan DAU/ *The General Allocation Fund* ( $X_2$ ) dianggap konstan, maka Belanja Daerah (BD) mempunyai nilai sebesar 19,061. Penelitian ini merupakan riset yang pengujian hipotesisnya menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Metode analisis linear berganda yaitu menghubungkan satu variabel dependen (terikat) dengan dengan beberapa variabel tidak terikat/bebas (*independent*) dalam suatu model penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menguji signifikan terhadap nilai koefisien regresi yang diperoleh baik secara simultan (*bersama-sama*) maupun secara parsial. Koefisien regresi variabel DBH yaitu sebesar 0,904, artinya jika DBH mengalami kenaikan 1% maka Belanja Daerah akan meningkat juga sebesar 90,4%. Hal ini menunjukkan bahwa jika DBH Kabupaten/Kota di Aceh mengalami kenaikan maka Belanja Daerah juga akan meningkat. Koefisien regresi variabel DAU yaitu sebesar 1,830, jika DAU mengalami kenaikan 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 183%. Hal ini di sebabkan karena DAU sangat mendukung untuk anggaran Belanja Daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Rona (2015) yang menyatakan bahwa DBH

berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah.

Hasil pengujian hipotesis kedua berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai  $\beta_1$  sebesar -0,465 ( $\beta_1 \neq 0$ ) dan hasil analisis tidak menolak hipotesis alternatif kedua. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan belanja daerah. Nilai signifikan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,293 adalah lebih besar dari tingkat keyakinan dalam penelitian ini sebesar 0,05. Artinya variabel pertumbuhan ekonomi daerah secara tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja daerah.

Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat diketahui bahwa nilai  $\beta_2$  sebesar 0,074 ( $\beta_2 \neq 0$ ) dan hasil analisis tidak menolak hipotesis alternatif ketiga. Hal ini berarti pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan belanja daerah. Nilai signifikan variabel pertumbuhan pendapatan asli daerah sebesar 0,016 adalah lebih kecil dari tingkat keyakinan dalam penelitian ini sebesar 0,05. Artinya variabel pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja daerah secara signifikan.

Hasil pengolahan data sesuai Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah adalah sebesar -0,465 dan 0,074. Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, dinyatakan bahwa syarat untuk menyatakan pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh adalah apabila paling sedikit ada satu  $\beta_i \neq 0$  ( $i = 1, 2$ ). Mengacu pada syarat tersebut, hasil pengujian hipotesis menyimpulkan untuk menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan tidak menolak hipotesis alternatif ( $H_a$ ) serta menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja daerah pada kabupaten/kota di Aceh.

Hipotesis alternatif pertama ( $H_{a1}$ ) tidak ditolak dengan koefisien determinasi (R square) sebesar 0,099. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah yang terjadi pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dipengaruhi oleh kedua variabel independen yaitu

pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa hipotesis alternatif kedua ( $H_{a2}$ ) tidak ditolak yaitu pertumbuhan ekonomi daerah secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja daerah.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan belanja daerah dengan nilai signifikan 0,016 atau lebih kecil dari 0,05. Variabel pertumbuhan pendapatan asli daerah memiliki koefisien regresi sebesar 0,074. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan pendapatan asli daerah maka semakin meningkat pula pertumbuhan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan dan analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja daerah (BD);
- Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh;
- Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan belanja daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Aceh;
- Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan belanja daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Aceh;
- Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan Belanja Daerah (BD) pada pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Afrah Junita. (2015). *Bukti Empiris tentang Pengaruh Budget Ratcheting terhadap Hubungan antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. Medan
- Adi, Priyo Hari. (2005). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Article Victoria University Melbourne*

- \_\_\_\_\_. (2006). Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang
- \_\_\_\_\_. (2007). Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi. *The 1<sup>st</sup> National Accounting Conference*. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- \_\_\_\_\_ dan David Harianto. (2007). Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar
- Arsyad, Lincoln. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi TKPN
- Arwati, Dini dan Novita Hadiati. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan*. Semarang
- Azzumar, Mochamad Rizky. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009, Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Bastian, Indra (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU, Edisi Kedua*. Jakarta: PT Indeks
- Firmansah. (2014). "Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas". <http://www.neraca.co.id/article/38452/Pertumbuhan-Berkualitas> [diakses 4 Februari 2018]
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Cetakan ke empat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar N. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika: Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [http://www.bappenas.go.id/files/4613/5230/1470/15peta-kemampuan-keuangan-provinsi-dalam-era-otonomi-daerah-tinjauan-atas-kinerja-pad-dan-upaya-yang-dilakukan-daerah\\_20081123002641\\_\\_14.pdf](http://www.bappenas.go.id/files/4613/5230/1470/15peta-kemampuan-keuangan-provinsi-dalam-era-otonomi-daerah-tinjauan-atas-kinerja-pad-dan-upaya-yang-dilakukan-daerah_20081123002641__14.pdf) (15 Desember 2015)
- <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/9937-kebijakan-umum-anggaran-pendapatan-belanja-daerah> (diunduh pada 4 Februari 2018)
- Kusuma, Hendra. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9(1): 1-11
- Lestari, Anita., Nasrullah Dali dan Muntu Abdullah. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* 1(2): 44-55
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change Chicago* 49(1):. 1-21.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- \_\_\_\_\_. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. (2004). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mayasari, Luh Putu Rani., Ni Kadek Sinarwati dan Gede Adi Yuniarta. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran

- Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal SIAK Universitas Pendidikan Ganesha* 2(1): 1-11
- Nurainy, Renny., Rooswhan Budi Utomo dan Desfitriana. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kota di Jawa Barat). *Prosiding PESAT*. Bandung
- Prasetyo, Eko. (2008). The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. *Jurnal Jejak* 1(1): 1-14
- Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
- \_\_\_\_\_. (2004). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
- \_\_\_\_\_. (2009). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Sidik, Machfud. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Orasi Ilmiah STIA LAN Bandung*
- Soejoto, Ady., Waspodo Tjipto Subroto dan Suyanto. (2015). Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development. *International Journal of Economics and Financial Issues* 5(3): 763-771
- Sriyana, Jaka. (2011). Disparitas Fiskal antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12(1): 56-66
- \_\_\_\_\_. (2012). *Dinamika Kinerja Fiskal di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Taiwo, Muritala dan Taiwo Abayomi. (2011). Government Expenditure and Economic Development. *European Journal of Business and Management*, 3(9)
- Tridimas, George. (2001). The economics and politics of the structure of public expenditure. *Public Choice* 106: 299-316
- Wertianti, I G A Gede dan A.A.N.B Dwirandra. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4(3): 567-584